

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAYAT DAN DESA TAHUN 2022

Dari table capaian pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijelaskan bahwa beberapa program, Kegiatan dan sub kegiatan, antara lain capaian kinerja dibawah 70%:

1. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) mendapat capaian kinerja di bawah 70% dikarenakan dalam mendukung kegiatan tersebut pada tahun 2022 adanya bantuan dari pemerintah pusat yang diturunkan dalam memberi bantuan terhadap pemberdayaan komunitas adat terpencil yang ada di daerah dan dalam menentukan penerima bantuan tersebut adanya kualifikasi yang berikan. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim dari Kabupaten Balangan hanya 55 Kepala Keluarga yang masuk dalam kualifikasi tersebut. Selain itu juga kendala lain anggaran yang ada belum dapat mensupport kegiatan.
2. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat mendapat capaian kinerja di bawah 70% dikarenakan jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah adanya laporan yang masuk dan dilakukannya assesment dalam penentuan masuk kedalam indikator tersebut dan dapat masuk kualifikasi hanya 7 Orang dari target yang ditentukan sebanyak 20 Orang.
3. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyediaan Makanan mendapatkan capaian kinerja dibawah 70% hal tersebut dikarenakan bahwa pada tahun 2022 intensitas dari bencana alam yang terjadi di Kabupaten Balangan tidak cukup tinggi. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2021 dimana intensitas bencana alam yang terjadi sangat tinggi. Sehingga capaian kinerja yang tercapai pada tahun 2022 tidak sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 500 KK yang mendapatkan penyediaan makanan dan pada realisasinya hanya ada 51 KK yang telah dibantu diberikan bantuan berupa penyediaan makanan.
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) mendapatkan capaian kinerja dibawah 70% dikarenakan indikator dari program tersebut adalah indeks perlindungan anak (IPA). Untuk memperoleh nilai indeks berasal dari Badan Pusat Statistik dan hingga saat ini untuk nilai indeks tersebut belum ada keluar.
5. Program Peningkatan Kerjasama Desa mendapatkan capaian kinerja dibawah 70% dikarenakan belum adanya realisasi dalam menjawab dari target program tersebut. Sebab untuk yang ada dilapangan belum adanya desa yang telah melakukan Kerjasama desa. Pada Tahun 2022 telah dilakukan rapat serta sosialisasi yang diberikan kepada seluruh kepala desa untuk dapat melaksanakan Kerjasama desa.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain capaian anggaran dibawah 70%:

1. Sub Penyediaan Jasa Surat Menyurat mendapatkan capaian anggaran dibawah 70% dikarenakan untuk anggaran yang ada tidak terealisasi pada tahun 2022.
2. Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa capaian anggaran dibawah 70% dikarenakan tidak terserapnya anggaran terkait Gaji dari Sarjana Penggerak Pembangunan Desa selain itu setelah dilaksanakan penjangkaran dan seleksi tidak terpenuhinya kuota dari jumlah sarjana penggerak pembangunan desa. Dan untuk gaji yang dibayar hanya 1 bulan dari yang dapat difasilitasi yaitu 4 bulan.
3. Sub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan mendapatkan capaian anggaran dibawah 70% dikarenakan anggaran yang terserap dan dapat direalisasikan sebanyak 2.850.000 dari anggaran yang ada sebanyak 4.960.000 dan dengan realisasi anggaran tersebut telah terpenuhinya target dari kinerja sub kegiatan tersebut.
4. Sub Kegiatan Alat Bantu mendapat capaian anggaran dibawah 70% dikarenakan setelah dilakukan pembelian alat bantu terdapat selisih harga di lapangan dan yang telah ditetapkan pada rencana kerja anggaran.

Sedangkan Dari table capaian pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijelaskan bahwa beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain capaian kinerja diatas 100%:

1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan capaian kinerja diatas 100% dikarenakan penentuan target sebanyak 2 Buah dan Realisasi Kinerja 21 Buah. Hal tersebut berupa pemberian surat rekomendasi terhadap permohonan atau usulan yang masuk.
2. Kegiatan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota mendapat capaian kinerja diatas 100% dikarenakan adanya anggaran dana yang dapat mendukung dalam tercapainya indikator dari kegiatan tersebut berkaitan dengan jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar sehingga dari target 10 desa dan realisasi sebanyak 26 Desa yang telah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar.
3. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa mendapat capaian kinerja diatas 100% dikarenakan indikator dari kegiatan tersebut jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa, pada tahun 2022 target sebanyak 154 Orang dan realisasi 308 Orang hal tersebut disebabkan karena adanya kegiatan bimbingan teknis yang diberikan dalam meningkatkan kompetensi dari para aparatur desa.
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak Tingkat daerah

Kabupaten/ Kota mendapat capaian kinerja diatas 100% dikarenakan adanya anggaran yang dapat memfasilitasi dalam memberikan pembinaan kepada desa, perempuan yang mengikuti pelatihan sehingga indeks ketahanan keluarga melebihi dari target yang ditetapkan.

5. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota mendapat capaian kinerja lebih dari 100% dikarenakan adanya anggaran yang mendukung dalam mencapai target dari kegiatan tersebut, serta adanya bantuan dana yang pemerintah pusat berikan untuk diberikan kepada masyarakat.
6. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota mendapat capaian kinerja lebih dari 100% dikarenakan adanya anggaran yang mendukung dalam mencapai target dari sub kegiatan tersebut. Sehingga jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan dari target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dan melebihi target. Selain itu adanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PUSPAGA.
7. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga mendapatkan capaian kinerja lebih dari 100% dikarenakan anggaran yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan sehingga pelayanan yang diberikan terhadap anak terlantar yang dilayani dapat berjalan dengan baik dan bisa lebih menjangkau dari target yang telah ditetapkan.
8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mendapatkan capaian lebih dari 100% dikarenakan SKPD telah menyusun sebuah kegiatan yang berbasis anggaran responsif gender.
9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat mendapat capaian lebih dari 100% dikarenakan anggaran yang tersedia dapat mendukung tercapainya target program melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
10. Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota dan subkegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana mendapat capaian lebih dari 100% dikarenakan anggaran yang ada dapat mendukung tercapainya target yang ditetapkan terkait anggota taganan yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.
11. Subkegiatan penyediaan data gender dan anak dikewenangan kabupaten/kota mendapat capaian kinerja lebih dari 100% dikarenakan anggaran yang ada dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dalam menyiapkan data gender dan anak kabupaten.
12. Subkegiatan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota mendapat capaian kinerja lebih dari 100% dikarenakan anggaran yang ada dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan dalam kader posyandu, lembaga dan masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak.
13. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota mendapat capaian kinerja lebih dari 100% dikarenakan anggaran yang tersedia dapat mendukung sehingga dapat memfasilitasi dalam

pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial sehingga keluarga fakir miskin dan organisasi sosial mendapatkan bantuan.

14. Program pemberdayaan sosial mendapat capaian lebih dari 100% dikarenakan anggaran yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang dalam mencapai target program.
15. Program perlindungan dan jaminan sosial mendapat capaian lebih dari 100% dikarenakan anggaran tersedia dapat mendukung tercapainya target berkaitan fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang kurang maksimal, sehingga terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang ditentukan.
2. Terdapat kegiatan yang melibatkan dengan pihak ketiga yang terkandung percepatan dalam pencapaian target belum dapat berjalan dengan baik.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan dan tupoksinya.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

1. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan memaksimalkan anggaran yang ada dan berupaya menjalin komunikasi baik dari pihak pemerintah pusat dan provinsi agar dapat diperhatikan dengan adanya kendala-kendala yang terjadi di lapangan.
2. Menjalinkan hubungan komunikasi yang baik dengan tetap melakukan koordinasi dengan para pihak ketiga terkait perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada agar dapat berkerja dan bertanggung jawab dengan tambahan tugas dan tanggungjawab dan melakukan dengan melakukan pendampingan dan menjalin komunikasi terkait hambatan-hambatan dalam merealisasikan target dari program dan kegiatan.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada.